

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa angka penindakan korupsi pada semester I tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017. Pada semester I ini penegak hukum telah melakukan penindakan sebanyak 139 kasus dengan 351 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dimana pada tahun 2017 dengan semester yang sama penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum sebanyak 266 kasus dengan 587 orang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun kerugian yang ditanggung oleh negara akibat kasus korupsi pada semester I tahun 2018 sejumlah Rp 1,09 triliun dan nilai suap sejumlah Rp 42,1 miliar. Berdasarkan pemilahan yang telah dilakukan oleh ICW modus yang dilakukan adalah penyalahgunaan korupsi, mark up, tindakan suap, pungutan liar, penggelapan, laporan fiktif, dan penyalahgunaan wewenang (Kompas, 2018).

Menurut Adinda dan Ikhsan (2015) kecurangan adalah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh individu atau sekelompok orang guna memperoleh keuntungan akan yang memberikan dampak pada laporan keuangan maupun kinerja dari organisasi serta dapat mengakibatkan kerugian. Aksi korupsi pada pemerintah terlihat dengan adanya penyuaipan, penggelapan barang publik untuk kepentingan pribadi memakzulkan perlindungan, , sampai dengan pencurian uang.

Kecurangan merupakan suatu kejahatan yang mencakup suatu kelihaihan dari seseorang untuk mengambil keuntungan dari pihak lain melalui gambaran yang salah (Mulia, 2017). Terdapat dua jenis kejahatan, yaitu :

- 1) Kecurangan sebagai suatu kejahatan. Kecurangan meliputi kemahiran individu dalam mengambil margin melalui gambaran yang salah.
- 2) Kecurangan sebagai suatu kesalahan. Kecurangan merupakan aktivitas yang dilakukan secara sengaja dalam memberikan laporan tentang keaslian material yang salah, tindakan ini dilakukan agar orang berkepentingan salah dalam mengambil keputusan, karena menganggap fakta-fakta tersebut benar.

Kecurangan biasanya dipicu karena keinginan untuk menyajikan laporan keuangan dalam keadaan surplus. Dalam instansi kerap kali dijumpai kasus penyalhagunaan aset oleh oknum-oknum tertentu dimana tindakan ini dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun sekelompok orang.

Pada sektor publik laporan keuangan merupakan alat komunikasi dengan masyarakat mengenai kinerja dari entitas publik sebagai wujud tanggung jawab yang dilakukan secara transparan kepada publik . Oleh karenanya laporan keuangan harus disusun oleh pegawai yang kompeten di bidang akuntansi keuangan daerah dan sistem akuntansi serta berperilaku jujur agar terhindar dari tindakan salah pencatatan atau kecurangan akuntansi. Pemerintah sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan kewajibannya secara efektif dan efisien. Namun faktanya masih banyak ditemui kasus kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab

di dalam pemerintahan yang secara langsung menyebabkan kerugian pada negara. *Fraud* dalam instansi pemerintah disebabkan karena organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, serta adanya tekanan yang tinggi.

Setiap individu pelaku kecurang memiliki motivasi yang beraneka ragam. Teori yang menjelaskan motivasi seseorang melakukan kecurangan adalah teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Cressy (1953) dalam Tuanakotta (2014) menyatakan bahwa *fraud* disebabkan oleh tiga faktor yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan pembenaran (*rationalization*).

Tekanan (*pressure*) merupakan motivasi yang berasal dari individu untuk bertindak curang yang disebabkan karena adanya tekanan baik tekanan keuangan maupun non keuangan. Dalam lingkup entitas salah satu penyebab terjadinya kecurangan yang terjadi dikalangan pegawai negeri sipil (PNS) dipicu oleh kompensasi yang diterima tidak sesuai sehingga menimbulkan ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai. Jika hal ini terjadi maka pegawai akan melakukan tindakan kecurangan agar dirinya merasa puas. Sehingga dalam penelitian ini tekanan atau *pressure* dikaitkan dengan keadilan distributif dan keadilan prosedural.

Moorhead dan Griffin (2013) mengartikan keadilan distributif sebagai persepsi orang-orang terhadap keadilan mengenai penghargaan dan hasil yang bernilai lainnya didistribusikan. Keadilan distributif berkaitan dengan gaji atau kompensasi atas pekerjaannya. Jika pegawai tidak merasakan adanya keadilan

dalam penentuan gaji atau kompensasi yang diperoleh maka akan melakukan sesuatu cara agar dirinya puas, seperti melakukan kecurangan.

Keadilan prosedural berhubungan dengan prosedur-prosedur dalam pemberian kompensasi. Ivancevich (2007) mendefinisikan keadilan prosedural sebagai pertimbangan mengenai prosedur yang digunakan dalam membuat keputusan alokasi dan sumberdaya. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan maka akan memberikan keadilan bagi para pegawai sehingga akan mengurangi tindakan kecurangan yang terjadi dalam perusahaan tersebut.

Kesempatan (*opportunity*) merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan peluang terjadinya kecurangan (*fraud*) yang disebabkan karena internal kontrol organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini dapat dikendalikan oleh perusahaan sendiri, faktor yang menyebabkan munculnya kondisi ini dilingkungan pemerintahan diantaranya, sistem pengendalian internal, penegakan peraturan dan asimetri informasi.

Menurut Wilopo (2006) adanya sistem pengendalian internal dalam organisasi sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi serta untuk mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Sistem pengendalian internal sangatlah penting dalam suatu instansi. Dalam mengendalikan organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien perlu adanya suatu aturan dan harus dipatuhi oleh para pegawai.

Kecurangan terjadi ketika adanya kesempatan dimana seseorang memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan untuk dilakukannya skema kecurangan. Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan (Suprajadi, 2009). Oleh karenanya untuk meminimalkan peluang individu untuk melakukan tindakan kecurangan perlu adanya pengendalian internal.

Penegakan peraturan merupakan proses yang dilakukan untuk menegakkan norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Asshidiqie, 2009). Oleh karenanya penegakan peraturan bertujuan untuk mencegah adanya perilaku yang tidak sesuai dengan aturan misalnya tindak kecurangan. Dengan penegakan peraturan yang baik diharapkan akan meminimalkan terjadinya tindak kecurangan.

Asimetri informasi adalah keadaan dimana tidak seimbangya informasi antara pihak dalam organisasi dengan pihak luar organisasi. Asimetri informasi akan memberikan peluang bagi pegawai untuk memberikan informasi yang tidak sesuai terutama yang berkaitan dengan kinerja pegawai. Sehingga jika terjadi ketidaksielarsan informasi maka akan memunculkan peluang untuk melakukan kecurangan.

Selain itu juga dipengaruhi oleh pembenaran (*rationalization*). Pembenaran (*rationalization*) merupakan pemikiran yang menganggap bahwa tindakan yang dilakukan merupakan wajar, yang secara moral dapat diterima atau dibenarkan dalam masyarakat yang normal. Pelaku *fraud* berusaha untuk

membenarkan perbuatannya dengan berupaya untuk mencari-cari alasan, hal ini dilakukan untuk menenangkan perasaan pelaku sehingga jika dilakukan tidak menimbulkan ketakutan dalam dirinya. Komitmen organisasi dan budaya organisasi merupakan faktor yang diduga sebagai alasan pembenaran atas tindakan pegawai melakukan kecurangan (*fraud*).

Komitmen organisasi adalah keadaan individu yang memihak pada organisasi dan mempertahankan haknya dalam organisasi (Robbins, 2008). Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi tersebut maka ia tidak akan melakukan suatu kecurangan yang akan memberikan dampak buruk bagi organisasi tersebut.

Menurut Robbins (2008) budaya organisasi adalah sistem yang dianut oleh anggota yang membedakan organisasi itu dengan yang lain. Budaya organisasi yang kuat akan memicu pegawai untuk berfikir, berperilaku dan bersikap sesuai dengan aturan yang ada dalam organisasi. Sehingga semakin kuat budaya organisasi maka semakin sedikit kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh karyawan.

Beberapa peneliti menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Didi dan Kusuma (2018) menghasilkan bahwa pengendalian internal dan penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap *fraud*, sedangkan keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, dan budaya organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti (2012) menghasilkan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural tidak

berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, sementara sistem pengendalian internal, kepatuhan pengendalian internal, budaya organisasi, dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Sementara pada Najahningrum (2013) dalam penelitiannya di Dinas Provinsi DIY menyatakan bahwa penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan di sektor pemerintahan, sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan di sektor pemerintahan, dan budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan di sektor pemerintahan.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Didi dan Kusuma (2018). Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian diatas dengan dengan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*) dengan menambahkan variabel independen yaitu asimetri informasi karena didalam pemerintahan saat penyusunan anggaran oleh pemerintah daerah agen akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi prinsipal demi untuk memperoleh kompensasi yang tinggi, mempertahankan jabatan, serta tujuan lainnya.

Obyek dari penelitian ini adalah Dinas Provinsi Jawa Tengah. Alasan dilakukannya penelitian di Jawa Tengah karena Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat keempat provinsi paling banyak kepala daerahnya yang terjerat korupsi. Selain itu, belum adanya penelitian mengenai kcenderungan

kecurangan (*fraud*) di Dinas Provinsi Jawa Tengah sehingga penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan obyek yang berbeda. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*), maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Pegawai Dinas Provinsi Jawa Tengah”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pernyataan tentang keadaan, fenomena, atau konsep yang memerlukan pemecahan atau jawaban melalui suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat yang relevan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh keadilan distributif terhadap kecurangan pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh keadilan prosedural terhadap kecurangan pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah ?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah ?
4. Bagaimana pengaruh penegakan peraturan terhadap kecurangan pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah?

5. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah ?
6. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kecurangan pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah?
7. Bagaimana pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Bagian tujuan penelitian mengungkapkan hasil penelitian yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Tujuan penelitian menjawab masalah penelitian yang mencerminkan ruang lingkup penelitian, metode yang digunakan dan hasil yang diharapkan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan distributif terhadap kecurangan pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan prosedural terhadap kecurangan pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum terhadap kecurangan pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah.
5. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah.

6. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kecurangan pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah.
7. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan kegunaan penelitian bagi khasanah ilmu pengetahuan, maupun penyelesaian masalah secara operasional dan kebijakan. Dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan kecurangan (*fraud*).
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur-literatur maupun penelitian di bidang akuntansi.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah Jawa Tengah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam usaha guna menekan terjadinya kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah.
- b) Bagi pembaca, dapat menjadi salah satu informasi tambahan dan referensi penelitian dalam bidang yang terkait serta dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.

- c) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan perbaikan dalam penelitian yang selanjutnya dimasa mendatang.